

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN ACEH BARAT

THE EFFECT OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND AND THE SPECIAL ALLOCATION FUND ON THE ALLOCATION OF HEALTH EXPENDITURES AT THE ACEH BARAT HEALTH OFFICE

Winni Irmiana

Universitas Teuku Umar
winniirmiana2306@gmail.com

Ika Rahmadani

Universitas Teuku Umar
ikarahmadani@utu.ac.id

Abstract

Aceh Barat is one of the regions receiving special autonomy funds and special allocation funds, but there are still many shortages of health facilities in the Aceh Barat region, even though health is the most important thing in human life. The purpose of this study is to see the effect of special autonomy funds and special allocation funds on the allocation of health spending at the Aceh Barat Health Office. This research is a quantitative type. In this research study, the data used is secondary data in the form of the Financial Statements of the West Aceh Health Service for 2010-2021. This data is time series data. This study uses multiple linear regression test. The technique in this study uses the classical assumption test, multiple linear regression, t test and f test. From the test results, it was found that the Special Autonomy Fund did not have a significant partial effect on the allocation of health spending where the t value was $0.2945 > 0.05$ and DAK had a significant effect on the partial health expenditure allocation where the t value was $0.0004 < 0, 05$, while simultaneously these two variables have a significant influence on the allocation of health spending where the f value is $0.000247 < 0.05$.

Keywords: Health Expenditure Allocation, Special Autonomy Fund.

Abstrak

Aceh Barat salah satu daerah penerima dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus tetapi masih banyak kekurangan fasilitas kesehatan di daerah Aceh Barat, padahal kesehatan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini yaitu melihat pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja kesehatan di Dinas Kesehatan Aceh Barat. Penelitian ini adalah jenis kuantitatif. studi penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Aceh Barat Tahun 2010-2021. Data ini yaitu *data time series*. Penelitian ini menggunakan Uji regresi linier berganda. Teknik pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t dan uji f. Dari hasil pengujian maka didapatkan bahwa dana Otsus tidak memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan yang mana nilai t sebesar $0.2945 > 0,05$ dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan secara parsial yang mana nilai t sebesar $0.0004 < 0,05$.

Sementara secara simultan kedua variabel tersebut memiliki penaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja Kesehatan, nilai f sebesar $0.000247 < 0,05$.

Kata kunci: Alokasi Belanja Kesehatan, Dana Otonomi Khusus

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia kesehatan ialah keperluan yang paling utama. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan pelayanan dan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menghadirkan berbagai program-program unggulan dalam bidang pelayanan kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Profil Dinas Kesehatan, 2020). Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka dibutuhkan biaya.

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yaitu elemen terpenting dalam sistem kesehatan nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Jumlah yang cukup dialokasikan secara adil, efektif dan efisien untuk menjamin terselenggaranya pelayanan untuk kesehatan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 171 menyatakan dana yang dianggarkan untuk kesehatan pemerintah daerah dari APBN paling sedikit 5% (lima persen) diluar gaji, dari APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di luar gaji. Berikut data yang dikumpulkan berdasarkan sumber data Dinas Kesehatan Aceh Barat:

Tabel 1
Belanja Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Aceh Barat Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun	APBD	Alokasi Belanja Kesehatan	(%)
2021	Rp 1.421.757.469.504	Rp 151.874.100.309	11%
2020	Rp 1.430.956.426.996	Rp 112.957.153.057	8%
2019	Rp 1.508.769.853.346	Rp 99.425.941.649	7%
2018	Rp 1.308.461.727.087	Rp 99.415.941.649	8%
2017	Rp 1.406.174.099.852	Rp 98.214.771.576	7%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengalokasian belanja kesehatan setiap tahunnya mengalami naik turun, serta pengalokasian belanja kesehatan yang bersumber dari APBD belum sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) UU tentang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Padahal anggaran yang diperuntukkan kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seharusnya pemerintah harus lebih meningkatkan lagi anggaran untuk kesehatan karena kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang banyak menghabiskan biaya.

Apalagi saat ini Aceh Barat masih kekurangan fasilitas kesehatan, ditambah lagi sejak awal 2019 Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang terdampak covid 19 yang menghabiskan banyak biaya untuk kesehatan. Padahal Aceh Barat ialah daerah di Aceh yang mendapatkan dana tambahan berupa dana Otsus dan DAK, mengapa masih saja Aceh Barat kekurangan persoalan fasilitas, ini menjadi salah satu fenomenanya.

Tabel 2
Otsus, DAK dan alokasi belanja Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Aceh Barat
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Alokasi Belanja Kesehatan	Otsus	DAK
2017	Rp 98.214.771.576	Rp 12.002.734.539	Rp 19.105.450.422
2018	Rp 99.415.941.649	Rp 12.093.490.130	Rp 23.004.767.000
2019	Rp 99.425.941.649	Rp 10.681.584.894	Rp 19.982.307.000
2020	Rp 112.957.153.057	Rp 8.483.322.333	Rp 39.317.422.104
2021	Rp 151.874.100.309	Rp 9.133.553.875	Rp 37.144.006.901

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh Barat

Dari data tabel 2.1 menunjukkan bahwa dana Otsus dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan mulai menurun dari tahun 2019-2020. Untuk dana alokasi khusus 2017-2021 mengalami naik turun. Jika mengacu pada UUPA No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan Dana Otsus, UU No 33 Tahun 2004 BAB 1 yang menyatakan DAK serta PERMENKES RI, yang semua peraturan tersebut menyebutkan bahwa dana-dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Namun pada kenyataannya masih saja belum ada pemerataan infrastruktur dibidang kesehatan di Aceh Barat.

Penelitian sebelumnya yaitu Darmayanti et.al (2016) menyebutkan “dana otonomi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja kesehatan, dan dana alokasi khusus juga berpengaruh terhadap alokasi belanja kesehatan”. Yunina et.al (2017) menyebutkan bahwa “dana otonomi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja pendidikan.”

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti perlu untuk melaksanakan suatu pengkajian yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Aceh Barat.” Penelitian ini adalah penelitian replika dari penelitian Darmayanti et.al (2016) tentang

“Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja kesehatan di Provinsi Aceh”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana di penelitian ini hanya terdapat dua variabel bebas, objek yang berbeda serta menggunakan jangka waktu yang juga berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana Otsus dan DAK terhadap alokasi belanja kesehatan.

B. Kerangka Teori

Alokasi Belanja Kesehatan

Dalam kehidupan manusia kesehatan ialah keperluan yang paling utama. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibutuhkan biaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi. Pembiayaan pelayanan kesehatan ialah elemen terpenting dari sistem kesehatan nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Jumlah yang cukup dialokasikan secara adil, efektif dan efisien untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 171 menyatakan dana yang dianggarkan untuk kesehatan pemerintah daerah dari APBN paling sedikit 5% (lima persen) diluar gaji, dari APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di luar gaji.

Dana Otonomi Khusus

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan keistimewaan yaitu keistimewaan mendapatkan dana Otsus, salah satu kabupaten di Aceh yang mendapatkan dana Otsus yaitu Aceh Barat. UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 183 ayat 1 tersebut menyatakan dana Otsus merupakan dana yang diterima oleh daerah khusus salah satunya daerah Aceh yang mana Pemerintah Aceh menerima dana otonomi khusus yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, terkhusus untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, serta untuk kesehatan, pendidikan, sosial, untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Pasal 183 ayat 2 menyatakan bahwa masa berlaku dana otonomi khusus ini hanya 20 tahun. Otonomi diberikan keada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan (Kiki Endah, 2016).

Dana Alokasi Khusus

UU Nomor 33 Tahun 2004 BAB 1 Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) yaitu dana yang pengalokasiannya berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. PERMENKES RI Nomor 8 Tahun 2021 Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa DAK fisik reguler kesehatan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, penyedia prasarana dan penyedia alat kesehatan.

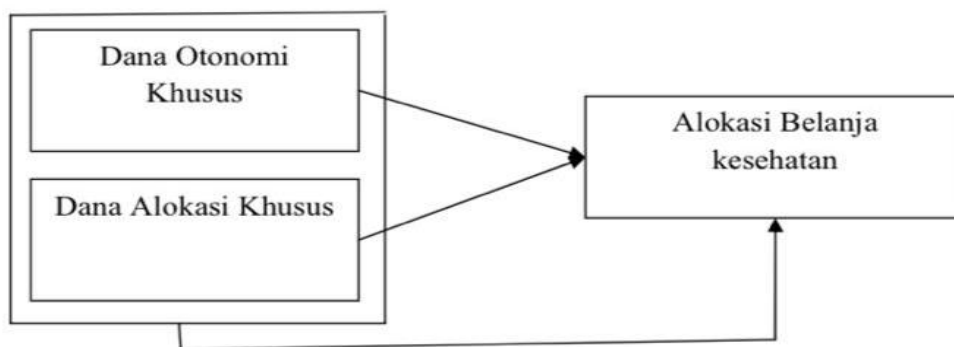
Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 183 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dana otonomi khusus merupakan dana yang diterima oleh daerah khusus salah satunya daerah Aceh yang mana Pemerintah Aceh menerima dana otonomi khusus yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, terkhusus untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, serta untuk kesehatan, pendidikan, sosial, untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) yaitu alokasi yang didapatkan dari APBN untuk pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ditujukan kepada daerah tertentu. Dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber dana untuk kesehatan, oleh karna itu dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus menjadi salah satu sumber dana yang akan mempengaruhi pada besar kecilnya alokasi belanja kesehatan.

Kerangka pemikiran ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang mana Darmayanti, dkk (2016) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa “dana otonomi khusus, alokasi belanja infrastruktur, peringkat kesehatan dalam ipkm dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja kesehatan di Provinsi Aceh.” Yunina dan Handayani (2017) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa “dana otonomi khusus, dana alokasi khusus dan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan secara simultan dan parsial pada dinas pendidikan di Provinsi Aceh.” Liando dan hermanto (2017) menyebutkan bahwa “dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah”. Iqbal, dkk (2020) menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana otonomi

khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Aceh.” Untuk lebih mudah memahami kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti membuat skema kerangka pemikiran, sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Pemikiran



Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas hipotesis yaitu:

H₁: Secara parsial adanya pengaruh yang signifikan dana OTSUS terhadap alokasi belanja kesehatan.

H₂: Secara parsial adanya pengaruh yang signifikan DAK terhadap alokasi belanja kesehatan.

H₃ : Secara simultan terdapat pengaruh dana OTSUS dan DAK terhadap alokasi belanja kesehatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah jenis kuantitatif, data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berkaitan dengan dana Otsus, DAK dan alokasi belanja kesehatan. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua belas tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Data ini merupakan data time-series. Untuk mengumpulkan data ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi laporan keuangan yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Aceh Barat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang mana (Janie, 2012) dijelaskan bahwa regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, yang mana terdapat teknik-teknik dalam uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

Lalu dilanjutkan dengan pengujian regresi linier berganda, yang diikuti uji t dan uji f. Dalam mengolah data peneliti menggunakan software Eviews10. Persamaan regresi yang dipakai yaitu :

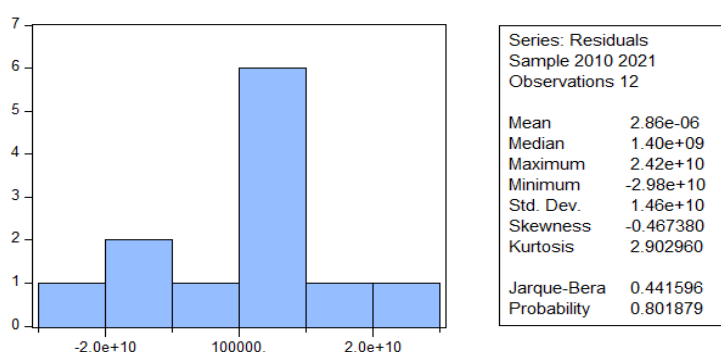
$$Y=a+b_1X_1+\beta_2X_2+e$$

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Uji ini memiliki tujuan Untuk menguji apakah suatu variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahuinya jika nilai probability > 0,05 maka terdistribui normal. Dilihat dari hasil pengolahan data tabel 3.1 uji normalitas nilai probability didapatkan sebesar 0,8018079, yang mana nilai probaility 0,8018079 > 0,05 artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8.60E+19	3.967302	NA
X2	0.181294	3.287440	1.327413
X1	1.288324	4.999458	1.327413

Sumber : Hasil pengolahan data Eviews 10

Untuk melihat setiap variabel X (bebas) memiliki hubungan atau korelasi atau tidak maka digunakan uji multikolinieritas. Berdasarkan hasil dari pengolahan data uji multikolinieritas nilai VIF yaitu $1,327413 < 10$ artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.901402	Prob. F(2,7)	0.1209
Obs*R-squared	5.438937	Prob. Chi-Square(2)	0.0659

Sumber : Hasil pengolahan data Eviews10

Untuk melihat ada tidaknya korelasi antar periode waktu pada data maka digunakan uji autokorelasi. Hasil dari pengolahan data uji autokorelasi nilai Probability, Chi-Square sebesar $0,0659 > 0,05$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Regresi Linear

Tabel 6
Hasil Pengujian Regresi Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.10E+10	9.27E+09	3.345799	0.0086
X2	2.291363	0.425786	5.381485	0.0004
X1	1.263357	1.135044	1.113047	0.2945
R-squared	0.842062	Mean dependent var		7.60E+10
Adjusted R-squared	0.806965	S.D. dependent var		3.67E+10
S.E. of regression	1.61E+10	Akaike info criterion		50.05784
Sum squared resid	2.34E+21	Schwarz criterion		50.17907
Log likelihood	-297.3470	Hannan-Quinn criter.		50.01296
F-statistic	23.99224	Durbin-Watson stat		2.839413
Prob(F-statistic)	0.000247			

Sumber : Hasil pengolahan data Eviews10

Berdasarkan hasil pengolahan data persamaan regresi liniernya yaitu :

$$Y = 3,1026835242 + 1,26335664881X1 + 2,29136255106X2$$

Penguraian dari persamaan regresi linier diatas yaitu:

1. Nilai koefisien dana otonomi khusus (X_1) sebesar 1,26 maknanya setiap penambahan satu satuan dana otonomi khusus maka pengalokasian belanja kesehatan juga mengalami penambahan sebesar 1,26.
2. Nilai koefisien dana alokasi khusus (X_2) sebesar 2,29 maknanya setiap penambahan satu satuan dana alokasi khusus maka pengalokasian belanja kesehatan juga mengalami penambahan sebesar 2,29.

Hasil Uji t berdasarkan data tabel 3.5 diatas didapatkan dana otonomi khusus (X_1) memiliki nilai probbility t sebesar $0.2945 > 0,05$ yang artinya dana Otsus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan. DAK (X_2) dana alokasi khusus nilai probabiityi t sebesar $0.0004 < 0,05$ Yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan. Untuk hasil uji f didapatkan nilai probability f sebesar $0.000247 < 0,05$ yang artinya secara simultan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Kesehatan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa dana otonomi khusus memiliki nilai probability t sebesar $0.2945 > 0,05$ yang artinya dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan pada Dinas kesehatan di Aceh Barat. Hal ini disebabkan karna menurunnya dana anggaran kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Barat.

Salah satu faktor menurunnya dana otonomi khusus pada Dinas Kesehatan disebabkan karna beberapa tahun terakhir ini terjadi pandemi yaitu seragan virus covid-19 yang mana pemerintah pusat terpaksa memangkas anggaran dana otonomi khusus, dan dimana memaksa pemerintah harus memusatkan kembali anggaran secara besar-besaran yang diperuntukkan untuk pencegahan virus covid-19, sehingga membuat banyak program yang sudah direncanakan harus mengalami perubahan dan pergeseran baik secara kegiatan maupun alokasi anggarannya, dinas kesehatan merupakan salah satu sektor yang terlibat kedalam upaya penanganan covid-19 yang harus melakukan pemusatan kembali anggaran secara signifikan (CALK TA, 2020). Sehingga hal tersebut membuat dana otonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap alokasi belanja kesehatan.

Dana otonomi khusus ialah salah satu dana penerimaan Aceh yang digunakan khusus untuk membiayai pembangunan, salah satunya pembiayaan pembangunan kesehatan. Maka diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi anggaran dana otonomi khusus untuk dinas kesehatan.

Hasil penelitian ini tidak searah dengan beberapa penelitian diantaranya Elwarin, dkk (2021) yang menyebutkan belanja modal secara signifikan dipengaruhi oleh dana Otsus, Anwar dkk (2018), Nufus Asmara (2017) serta Jikwa., Salle (2017) yang menyebutkan dana OTSUS berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Tidak searah nya penelitian ini disebabkan oleh perbedaan lingkup wilayahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Kesehatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t probabilitas $0,0004 < 0,05$ yang berarti dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap distribusi belanja kesehatan pada Dinas Kesehatan Perekonomian Aceh Barat. Dampak DAK terhadap alokasi belanja kesehatan adalah alokasinya berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan relevansinya dengan prioritas nasional. Hal ini berbeda dengan fenomena yang telah dijelaskan dalam konteks Aceh Barat masih kurangnya infrastruktur di bidang kesehatan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pandemi, khususnya COVID-19, di mana pemerintah harus memfokuskan kembali anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pencegahan COVID-19.

Agar dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan untuk belanja pencegahan Covid-19, maka belanja COVID-19 termasuk dalam belanja kesehatan. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan alokasi belanja kesehatan dipengaruhi oleh DAK. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Yunina dan Handayani (2017)., yang menyatakan dana alokasi khusus berdampak positif terhadap alokasi belanja pendidikan, Iqbal, M. dkk (2020) dan Ferdiansyah dkk (2018) menemukan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat

Dari pengujian yang telah dijalankan peneliti mendapatkan hasil pengujian hipotesis yaitu nilai probabilitas f sebesar $0,000247 < 0,05$, sehingga dana Otsus dan DAK secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja kesehatan. Dana Otsus adalah dana bagi daerah khusus yang salah satunya oleh pemerintah Aceh, untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah tertentu guna membantu mendanai kegiatan tertentu yang bersifat kedaerahan dan sejalan dengan prioritas nasional untuk sasaran daerah tertentu. Dana Otsus dan DAK merupakan bagian dari dana belanja kesehatan, yang menunjukkan bahwa dana otonomi khusus dan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja kesehatan. Penelitian ini sama dengan penelitian Darmayanti dkk (2016) menurut penelitiannya dana otsus, alokasi belanja infrastruktur, peringkat kesehatan di IPKM dan kinerja fiskal pemerintah berpengaruh positif terhadap distribusi belanja kesehatan di Aceh.

E. Kesimpulan

Dalam kehidupan manusia kesehatan adalah hal yang paling utama, tingkat kesehatan di Aceh Barat belum dapat terpenuhi dikarenakan fasilitas kesehatan yang kurang memadai hal ini dikarenakan anggaran kesehatan yang bersumber dari Otsus dan DAK yang tidak stabil yang mengalami naik turun. Kesimpulan yang dapat ditarik penulis yaitu: Secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dana otonomi khusus terhadap alokasi belanja kesehatan di Dinas Kesehatan Aceh Barat. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja medis di Dinas Kesehatan Aceh Barat. Secara simultan memiliki pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja kesehatan di Dinas kesehatan Aceh Barat.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan PDRB Terhadap Belanja Daerah Di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 2(1), 1-13.
- Asmara, J. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Sendiridan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus sebagai Pemoderasi pada Kab/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*.
- Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2020. [Buku]. Dinas Kesehatan Aceh Barat.
- Darmayanti, dkk (2016) “Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Kesehatan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”*Jurnal Kebangsaan*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. ISSN:2089-5917.vol.5, No.9, Januari 2016.
- Elwarin, dkk (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dab Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal di kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019, Universitas Widyagama Malang, P-ISSN:2598-5272, 2021.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani Dwi dan Nuraina Elva (2012) “ Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah kabupaten Madiun” *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, oktober 2012.
- Iqbal, M., Abbas, T., dan Ratna (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” *Jurnal Manajemen Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, Juli –Desember 2020.
- Janie, D.N.A (2012).*Statistik Deskriptif dan regresi Linier Berganda*. Semarang : University Press.
- Jikwa, E., Salle, A., & Layuk, P. K. A. (2017).Pengaruh Pendapatan Transfer dan Silpa terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(2).
- Kiki Endah (2016), Pelaksanaan Otnomi Daerah di Indonesia, Moderat, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2 (2016).

Liando,I dan Hermanto, B (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 6, Nomor 6, Juni 2017.

Nadilla, T., & Hidayanti, A. (2021). Opportunities and Challenges of Sharia Accounting Development. In *UPP & Corolla International Conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 106-109).

Profil Dinas Kesehatan Aceh Barat tahun 2020. [Buku]. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di akses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 09:04 WIB melalui internet.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10:03 melalui internet.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 09:37 WIB melalui internet.

Yassarli dan Syahnur S. (2018) “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Aceh” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), UNSYIAH*. Vol. 3 No. 4 November (2018).

Yunina F. dan Handayani T. (2017) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan provinsi Aceh” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah aceh. Vol 8, No 1 (2017).